

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN  
UANG DENGAN JUMLAH YANG TIDAK SAMA JIKA DIKAITKAN  
DENGAN PEMAHAMAN PARA PELAKU**

**A. Analisis Terhadap Praktik Penukaran Uang Dengan Jumlah Yang Tidak Sama**

Berdasarkan data yang terdapat pada bab sebelumnya, terkait dengan praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menurut analisis penulis bahwa, praktik ini merupakan tukar menukar uang, karena tidak adanya unsur tawar menawar seperti halnya jual beli. Praktik penukaran uang ini juga merupakan bagian dari muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Karena tidak ada nash yang secara khusus melarang praktik penukaran uang ini. Yang dilarang hanyalah transaksi barang riba yang harus dilakukan secara kontan dan seimbang.

Tukar menukar uang merupakan salah satu cara manusia untuk bisa mempermudah dalam mencari uang *receh* atau uang logam, bisa juga uang pecahan dari uang kertas. Pada bab III penulis sudah menjelaskan tentang praktik tukar menukar uang yang ada di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pemilik usaha penukaran uang sudah menjadikan penukaran uang itu sebagai biaya kehidupannya sehari-hari











sebelum kedua pihak itu berpisah harus sudah diserahkan barang tersebut, apabila yang dipertukarkan itu mata uang maka harus sama, maksudnya adalah kualitas atau kuantitasnya itu harus sama tidak ada yang lebih atau kurang dalam nilai harganya, tidak boleh adanya *khiyaar* syarat, dan harus tunai.

Adapun rukun dalam melakukan akad *al-ṣarf* adalah adanya penjual (*ba'i*) yang mana dalam praktik penukaran uang ini biasa dinamakan pemilik usaha penukaran uang, adanya pembeli (*musytari*) yang biasanya dikatakan dengan penukar uang. Adanya objek akad, dalam praktik penukaran uang ini adalah uang yang digunakan untuk tukar menukar, dan adanya ijab dan qabul.

Jika pemilik usaha penukaran uang tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang kekurangan yang didapatkan oleh penukar uang tersebut adalah upah untuk pemilik usaha penukaran uang, maka dalam Islam penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama tersebut diperbolehkan. Dalam Islam akad yang dipergunakan adalah akad *ujrah*.

Sedangkan dalam sistem penukaran yang tidak ada kejelasan dalam melaksanakan akad penukaran uang tersebut, sehingga pihak penukar uang tidak faham manfaat terhadap kekurangan yang didapatkan dari hasil penukaran uang tersebut, karena yang

diketahui bahwa dalam penukaran uang itu harus sama jumlah nilainya, dan penukar uang merasa dirugikan akan kekurangan itu, maka dalam Islam praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama itu tidak diperbolehkan. Islam biasanya menyebutkan dengan akad *al-ṣarf*. Yang mana dalam penukaran uang itu harus sama jumlahnya, meskipun bentuk barangnya berbeda.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang syarat-syarat dalam menukarkan uang (*al-ṣarf*), diantaranya adalah terdapat serah terima diantara kedua belah pihak sebelum berpisah, apabila mata uang maka harus sama jenisnya, tidak ada *khiyaar* syarat, dan yang terakhir tidak boleh ada tenggang waktu.

Dilihat dalam segi rukun *al-ṣarf*, pelaku akadnya ada, seperti penjual dan pembeli, objek akadnya dan ijab qabul sudah sesuai. Penulis menyimpulkan bahwa kekurangan seperti itu bisa saja dikatakan sebagai riba, karena dalam akad *al-ṣarf* itu harus sama jumlah nilainya. Jika tukar menukar uang kertas dengan uang logam atau uang *receh* tetap dengan jumlah yang sama.